

Wawancara M. Hussein Umar BERHARAP PADA POROS MARITIM



Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pertamanya sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober 2014 menyampaikan bahwa: *“Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia.”*

Apa yang disampaikan presiden Joko Widodo dalam pidatonya tersebut semakin mempertegas tentang begitu penting dan berartinya tata kelola kemaritiman secara menyeluruh. Dengan luas wilayah lautan yang mencapai 2/3 dari total luas wilayah Indonesia, jumlah pulau yang lebih dari 17.000 ribu, kekayaan laut yang luar biasa, ditambah fungsi kelautan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara menjadikan sektor maritim semacam elan kedaulatan negara.

Supaya Poros Maritim tidak berada pada ruang dan wilayah wacana saja, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dengan program dan capaian yang terukur, maka dibutuhkan upaya serius dari pemerintahan Jokowi dan JK beserta jajarannya untuk mewujudkannya.

Dalam aktualitas dan konteks memaknai pentingnya Poros Maritim, Jurnal Selisik Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila melakukan wawancara bersama M. Husseyn Umar, mantan Direktur Utama Perusahaan Sewa Guna Perkapalan PT. PANN dan mantan Direktur Utama Perusahaan Pelayaran Nasional PT. PELNI. Wawancara diharapkan mampu membuka pemahaman dan pemaknaan mengenai apa yang disebut dengan Poros Maritim.

S : *Pemerintahan Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla meletakkan kemaritiman sebagai poros penting dalam visi dan agenda kebijakannya. Pandangan Bapak Terkait poros maritim?*

HU : Saya kira apabila pemerintahan sekarang mengutamakan negara Indonesia pada pengembangan sektor-sektor maritim itu sangat tepat. Apalagi mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang demikian besar dengan posisi geografisnya begitu strategis diantara dua benua besar, yakni Asia dan Australia, pulau yang begitu banyak dan laut yang besar. Potensi kelautan yang kita miliki demikian banyak, seperti transportasi antar pulau dan kekayaan laut berupa nabati dan hewani. Hal itu harus dibangun sekaligus dan memerlukan pola pembangunan yang komprehensif.

S : *Masalah krusial kemaritiman salah satunya, bagaimana kedaulatan laut bisa dijaga, Pendapat bapak tentang hal ini?*

HU : Kalau mengenai kedaulatan laut, angkatan laut harus lebih up-date dalam armadanya, persenjataannya, sumber daya manusia. Selain itu aspek penegakan hukum dan keselamatan perlu ditingkatkan. Di sisi yang lain pantai-pantai kita harus memiliki tanda-tanda keamanan yang benar, seperti menara-menara laut yang harus berfungsi. Jangan sampai menara laut tidak hidup, sehingga kalau ada kapal-kapal yang lewat tidak tahu sebetulnya kapal dari mana. Pelabuhan-pelabuhan kita juga harus dijaga, jangan sampai ada kapal yang kandas. Juga yang penting untuk dibangun yaitu galangan-galangan kapal. Karena untuk *replacement*/penggantian armada kita harus punya galangan sendiri.

S : *Bagaimana penyediaan infrastruktur yang mendukung poros maritim?*

HU : Pulau di Indonesia itu tersebar kesana-kemari, begitu banyak aliran orang dan aliran barang tidak begitu lancar. Hal demikian karena tidak selalu tersedianya alat transportasi laut, terutama untuk daerah-daerah yang terpencil yang membuat kapal-kapal jarang kesana. Kadang-kadang ada berbagai *handicap* kapalnya datang, seperti kapalnya rusak, barang yang mau diangkat belum tersedia, kalau toh ada yang diangkut terlalu murah biayanya, sementara biaya kapalnya mahal, kemudian truknya kurang atau truknya ada halangan di jalan, atau ada masalah dengan bea cukai. Hal inilah yang membikin kesulitan.

Jadi masih banyak hal-hal yang harus ditangani dan dipikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana jalur-jalur laut yang pokok/utama itu ada. Itu yang pada zaman dulu disebut sebagai reguler liner service, yakni adanya jasa transportasi laut reguler, teratur, tetap dan selalu ada.

S : *Keseriusan pemerintah mempersiapkan sektor maritim ditunjukkan dengan membangun apa yang oleh Presiden Jokowi disebut sebagai Tol Laut. Pendapat Bapak tentang Tol Laut?*

HU : Menurut saya, kata tol laut itu kurang tepat, karena tol itu semacam pajak, seperti kalau kita lihat dan melewati jalan tol yang membayar di gerbang tol. Jadi tol laut bukan seperti tol jalan raya. Yang dimaksud dengan tol laut itu adalah adanya hubungan transportasi laut yang tepat dan teratur dari satu tempat ke tempat lain di Indonesia. Jadi kalau orang ingin bepergian atau melakukan pengangkutan melalui laut dari satu tempat ke tempat lain selalu tersedia armada lautnya, sebagaimana yang sudah dilakukan kereta api. Kereta Api sudah bagus, dimana jadwal kereta api sudah jelas mengenai jam-jam keberangkatannya.

S : *Kendala yang dihadapi untuk merintis transportasi laut yang tepat dan teratur untuk membantu mewujudkan poros maritim?*

HU : Masalah utama adalah persoalan ketersediaan dana. Kalau mengandalkan pada anggaran negara itu tidak mungkin. Jadi harus membuka iklim investasi, baik itu modal dari swasta maupun itu modal dari luar. Untuk memperlancar hal tersebut perlu dipersiapkan pengaturan-pengaturan yang cukup menarik, seperti perijinan jangan terlalu birokratis dan dimungkinkan adanya keringanan-keringanan bea atau pajak bagi para investor.

S : *Harapan bapak sendiri terhadap visi kemaritiman ini?*

HU : Kalau pemerintah menganggap penting sektor maritim ini supaya betul-betul dilaksanakan, beri prioritas. Sekarang apakah rencana-rencana pemerintah yang di sampaikan pemerintah ini juga ditunjang oleh oleh DPR. Kita belum mendengar. Suara DPR kurang terdengar mengenai soal-soal maritim yang ditonjolkan oleh pemerintah.

S : *Untuk mewujudkan visi kemaritiman?*

HU : Tentu dengan planning yang jelas, Kalau dulu kan ada Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), sementara hal demikian sekarang tidak ada, sehingga masyarakat tidak ada gambaran terkait dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing sektor. Jadi koordinasi dalam planning sangat diperlukan. Tanpa semacam koordianasi planning masyarakat tidak bisa mengikutinya. Kemudian tahap-tahapnya harus detil dan terukur, seperti apa yang mau dikerjakan, sumber dananya dari mana, kalau dari APBN bagaimana, kalau dari luar negeri bagaimana, apa syarat-syaratnya yang harus dibuat supaya luar negeri ini tertarik terhadap sektor kemaritiman ini.

S : *Bagaimana dengan keberadaan Koordinator Kementerian Bidang Kemaritiman?*

HU : Saya kira koordinasi itu diperlukan. Tetapi yang saya lihat sekarang diantara kementerian masih jalan sendiri-sendiri. Kementerian Perhubungan masih jalan sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih jalan sendiri. Masing-masing masih bertindak menurut sektornya masing-masing. Memang tidak mudah, karena sektor maritim ini sangat luas sekali, baik itu sektor maritim yang horisontal, vertikal dan belum lagi masalah-masalah dengan negara-negara yang berdekatan dengan kita, seperti masalah diplomasi maritim mengenai batas laut dimana kita masih punya gesekan-gesekan dengan negara-negara disekitar kita.